



DISDUKCAPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROVINSI SULAWESI TENGAH

RENCANA KERJA 2026

Jl. Pramuka No. 21,
Besusu Barat
Palu Timur



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000-7.2/251/Bappada - 9.51/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

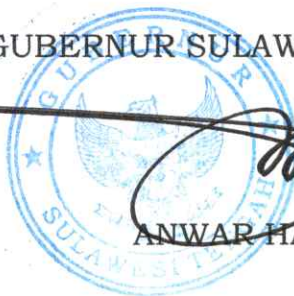
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubenrur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... 6 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

1. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;

22. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah;
38. Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

KATA PENGANTAR

Foreword



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RENJA Tahun 2026 merupakan bagian dari rangkaian sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menjadi dasar operasional bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan pelaksanaan program serta kegiatan pada Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

RENJA ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, target, serta kebutuhan anggaran yang dirumuskan berdasarkan analisis capaian kinerja tahun sebelumnya, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan, serta dinamika kebijakan nasional maupun daerah. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan menjadi instrumen perencanaan yang mampu mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan secara efektif, efisien, akuntabel, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Palu, 13 Oktober 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah



ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

DAFTAR ISI

Table of Contents



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii

RENJA TAHUN 2026

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penyusunan	8
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA	
KERJA PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2024	10
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dukcapil	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Sulawesi Tengah	32
3.3. Program dan Kegiatan	33
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
BAB 5 PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

List of Tables



Tabel 2.1	Tabel Review Pelaksanaan Renja 2022 - 2025 _____	11
Tabel 2.2	Realisasi Program Kegiatan Tahun 2024 _____	16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah _____	20
Tabel TC.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 _____	23
Tabel 2.5	Usulan Program dan kegiatan Para Pemangku Kepentingan tahun 2025 ____	28
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 _____	37
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah _____	49

PENDAHULUAN

Introduction

Latar Belakang - Landasan Hukum - Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penyusunan



1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan OPD satu tahunan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

Renja 2026 memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif sebagai sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja. Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusun perencanaan berdasarkan pendekatan kinerja yaitu sistem yang mengutamakan upaya pencapaian hasil (outcome) dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Renja DISDUKCAPIL 2026 dijadikan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dengan mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dan Nasional pada umumnya.

Selanjutnya Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140);
39. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah (LKJIP) untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun berikutnya.

Tujuan

Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dalam koordinasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 untuk pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam RKPD Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DUKCAPIL TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DUKCAPIL 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DUKCAPIL
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi DUKCAPIL
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Telaahan Renstra DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.3. Tujuan dan Sasaran DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.4. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan beserta kebutuhan dananya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah- kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Performance Review of the Work Plan
(RENJA) Implementation

Evaluasi Pelaksanaan RENJA 2025 – Analisis Kinerja Pelayanan – Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi – Review Rancangan RKPD 2026



2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2025

Pada tahun 2025, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 1 tahun dapat diketahui dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun 2025 dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Evaluasi ini ditujukan sebagai bahan penyusunan terhadap Renja yang akan datang.

Plafon anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yaitu Rp. 9.174.837.557.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan (tahun 2025).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2025, disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Renja sampai 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA SKPD) Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA SKPD Tahun (n- 2) 2023	Realisasi RENJA SKPD Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-0) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+7)	11 = (10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	70,05	55,39%	64	54,67	78,04	66		
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	86		74	72,65	84,48	80		
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP Perangkat Daerah	100%	97	100	100%	100%	100%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA SKPD) Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA SKPD Tahun (n- 2) 2023	Realisasi RENJA SKPD Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-0) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+7)	11 = (10/4)
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan	100%	100%	100	100%	100%	100%		
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	80							
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	80							
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	80							
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	85%							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA SKPD) Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA SKPD Tahun (n- 2) 2023	Realisasi RENJA SKPD Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-0) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+7)	11 = (10/4)
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	65%	50,33%	53%	44,69%	84,32%	65%		
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Penduduk Terpencil dan Penyandang Disabilitas Kab/Kota yang Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk	30%							
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Penduduk Kab/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Layanan Pendaftaran Penduduk	2%							
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA SKPD) Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA SKPD Tahun (n- 2) 2023	Realisasi RENJA SKPD Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-0) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+7)	11 = (10/4)
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	100%	92,20%	100%	98,56%	98,56%	100%		
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten /Kota yang diberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Layanan Tata Kelola Data Adminduk yang memanfaatkan IT	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang Terbina dan Terawasi Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA SKPD) Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA SKPD Tahun (n- 2) 2023	Realisasi RENJA SKPD Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-0) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+7)	11 = (10/4)
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tabel 2.2
Realisasi Program Kegiatan Tahun 2025

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	11=(10/4)
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	59	46,97	79,61
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81	63,05	77,84
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP Perangkat Daerah	100	100	100
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan	100	100	100
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	80	-	-
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	65	-	-
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	65	-	-
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	85	85	100
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	25	62,23	248,92
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rate Net Recent Migrasi	924	1.061	114,83
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	50	50,36	100,72
		Persentase Penduduk yang Menggunakan IKD	3	1,23	41

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	11=(10/4)
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100	100
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	70	77,51	110,73
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten /Kota yang diberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	13	13	100
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	100
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Layanan Tata Kelola Data Adminduk yang memanfaatkan IT	100	100	100
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang Terbina dan Terawasi Sesuai Ketentuan	100	100	100
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	100	100	100
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100	100	100

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi melaksanakan :

- a) Koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di provinsi dan antarkabupaten/kota secara berkala;
- b) Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di provinsi;
- c) Penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di provinsi dan kabupaten/kota;
- d) Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- e) Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- f) Sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- g) Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- h) Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- i) Pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j) Bimbingan teknis pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan;
- k) Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- m) Pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

- n) Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- o) Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok :

“Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- c) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Penatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Penatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- f) Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR	Target RENSTRA SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	-	-	23,07	30,76	-	-	23.07	30,76

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu – isu penting merupakan kondisi atas hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD, berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Belum Semua penduduk Sulawesi Tengah memiliki Dokumen Kependudukan
- 2) Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Semua Urusan

Dengan memperhatikan permasalahan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat di inventarisasi beberapa isu penting yang menjadi prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026, yakni :

- 1) Visi Misi Gubernur Sulawesi Tengah terpilih yang dijabarkan dalam Program-Program Prioritas untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- 2) Penjangkauan Layanan Jemput Bola untuk mendorong cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.
- 3) Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada petugas layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dengan melaksanakan Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana untuk penyelenggaraan layanan Adminduk.
- 5) Pengawasan dan Pembinaan terhadap Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
- 6) Sosialisasi melalui Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya.
- 7) Peningkatan tata kelola Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan melalui penguatan regulasi, perlindungan data pribadi, kesiapan infrastruktur dan SDM, serta pengawasan lembaga mitra.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2026

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Resntra SKPD dan tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.

Review terhadap rancangan awal RKPD 2026 dapat dilihat pada tabel TC.31 berikut :

Tabel TC.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.895.109.247				10.895.039.247,18	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Indeks Reformasi Birokrasi	60	9.485.290.647	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Indeks Reformasi Birokrasi	60	8.745.039.247,18	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Nilai SAKIP	86	579.006.700	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Nilai SAKIP	86	465.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP Perangkat Daerah	100	5.934.732.892	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP Perangkat Daerah	100	5.950.039.247,18	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	66.659.800	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	34.500.000	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	275.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	1.296.880.015	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	425.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	80	92.244.440	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	80	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	80	968.586.800	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	80	1.100.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1	512.680.000	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1	430.000.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	30	457.045.700	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	30	675.000.000	
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	1	-	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	1	175.000.000	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1	457.045.700	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1	325.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1	-	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1	175.000.000	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	72,1	364.873.950	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	72,1	675.000.000	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	1	364.873.950	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	1	250.000.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	1	-	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	1	125.000.000	
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	-	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	300.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	367.517.950	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	550.000.000	
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	13.491.950	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	50.000.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Lembaga Pengguna yang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi untuk layanan publik (kumulatif)	12	352.026.000	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Lembaga Pengguna yang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi untuk layanan publik (kumulatif)	12	325.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	2.000.000	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	175.000.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	100	220.381.000	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	100	250.000.000	
	Penyediaan Profil Kependudukan	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Persentase Profil Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100	220.381.000	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab Se Sulteng	Persentase Profil Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100	250.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dilakukan pengumpulan usulan kegiatan dari OPD dan bukan merupakan hasil dari musrenbang, sehingga untuk tabel 2.5 yaitu Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2026, tidak dapat disajikan. (Nihil).

Tabel 2.5

Usulan Program dan kegiatan Para Pemangku Kepentingan tahun 2026

No .	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volum e	Catata n
			■■■■■ NIHIL ■■■■		

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan administrasi kependudukan tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 serta RKP Tahun 2026. Dokumen perencanaan nasional tersebut memberikan kerangka strategis yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dasar, transformasi digital, serta pemenuhan hak identitas hukum bagi seluruh warga negara. Dalam kerangka tersebut, administrasi kependudukan memiliki posisi strategis karena menyangkut pengakuan negara terhadap eksistensi setiap penduduk, yang sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.

RPJMN 2025–2029 dengan visi “Indonesia Emas 2045” mengusung delapan agenda pembangunan atau Asta Cita. Salah satu yang relevan dengan urusan administrasi kependudukan adalah agenda **memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas**. Administrasi kependudukan menjadi prasyarat penting dalam mendukung agenda tersebut, karena data penduduk yang lengkap, akurat, dan mutakhir merupakan dasar dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat secara lebih adil dan inklusif.

Kebijakan nasional menegaskan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemenuhan dokumen seperti akta kelahiran, KTPel, kartu keluarga, akta perkawinan, akta kematian, hingga dokumen pencatatan sipil lainnya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, serta penduduk yang tinggal di daerah terpencil. Hal ini menjadi manifestasi nyata dari agenda Asta Cita dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara.

Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur tidak terlepas dari pentingnya penyelenggaraan administrasi kependudukan. Data kependudukan yang komprehensif, akurat, dan *real-time* merupakan fondasi dalam merencanakan pembangunan nasional, mengukur capaian, serta menyalurkan berbagai bentuk layanan publik.

Lebih lanjut RKP 2026 menekankan pentingnya transformasi digital pelayanan publik, termasuk dalam sektor administrasi kependudukan. Layanan berbasis digital bukan hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menjamin aksesibilitas masyarakat luas. Integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) menempatkan data kependudukan sebagai referensi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan lintas sektor. Dengan demikian Dukcapil dituntut untuk mengembangkan infrastruktur digital yang handal sekaligus melindungi keamanan data pribadi penduduk.

Selain itu, arah kebijakan nasional menekankan pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk memperkuat kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Dalam sektor pendidikan misalnya, data kependudukan menjadi dasar validasi penerimaan bantuan pendidikan, di bidang kesehatan, data kependudukan memastikan jaminan kesehatan masyarakat lebih tepat sasaran; sementara dalam program perlindungan sosial, akurasi data penduduk menjadi kunci penyaluran bantuan yang adil. Dengan demikian, peran Dukcapil bukan hanya secara administratif tetapi juga strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah maupun nasional.

Kebijakan nasional juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan layanan kependudukan. Dukcapil provinsi bersama kabupaten/kota diharapkan meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan, layanan kesehatan, lembaga perlindungan sosial, serta organisasi masyarakat sipil untuk menjamin pemenuhan hak identitas hukum bagi semua penduduk. Kolaborasi ini selaras dengan Asta Cita yang menekankan penguatan peran pemuda, perempuan, dan kelompok rentan dalam pembangunan, di mana administrasi kependudukan dapat berperan sebagai pintu masuk inklusi sosial.

Di sisi lain, pemerintah pusat menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur Dukcapil agar adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kompetensi SDM dalam mengelola sistem digital, keamanan data, serta inovasi pelayanan menjadi salah satu fokus kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan. Hal ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme birokrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional tersebut, RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun untuk memastikan integrasi antara prioritas pembangunan pusat dan kebutuhan daerah. Melalui sinkronisasi ini, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan di Sulawesi Tengah semakin inklusif, berbasis teknologi, melindungi kelompok rentan, serta mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagaimana amanat Asta Cita dan visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DUKCAPIL

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a) Tujuan

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur terpilih, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah yaitu **"Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi"**.

b) Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, maka dirumuskan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026 yaitu **"Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital"**.

Tabel 3.1
TUJUAN / SASARAN dan TARGET 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2026
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi		Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83
2		Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	30,76

3.3. PROGRAM dan KEGIATAN

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di uraikan sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

- a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - 1) Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi.
 - 2) Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi.
 - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pendaftaran Penduduk.
 - 2) Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk.
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk.
- 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk.

2. Program Pencatatan Sipil

- a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi.
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota.
 - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Laporan Admuduk terkait Pencatatan Sipil.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil.
 - 2) Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil.
- c. Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil.
 - 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admuduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - 2) Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- a. Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi.
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.
 - 5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
 - 7) Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.
 - 8) Sub Kegiatan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - 3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - 4) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 5) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan.
 - 6) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 5) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - 6) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH			10.895.039.247,18			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.895.039.247,18			
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			10.895.039.247,18			
1,	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	9.485.220.647,18			
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	86 Nilai	579.006.700,00			
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	119.131.700,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	12.950.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	209.029.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
	2.12.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	37 Data	6.700.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	1 Dokumen	8.250.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>	1 Berita Acara	222.946.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	<i>Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu</i>	1 Subtansi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Anggaran</i>	92 Persen	5.934.732.892,18			
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	42 Orang/ Bulan	5.895.039.442,18	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	39.693.450,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	66.659.800,00			
	2.12.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.099.900,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.049.900,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	36.510.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	34.500.000,00			
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	34.500.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	101 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	1.296.880.015,00			
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	8.175.340,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	313.431.300,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	22.177.375,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	953.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	92.174.440,00			
	2.12.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Paket	11.007.640,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	81.166.800,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</i>	1 Laporan	968.586.800,00			
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	212.966.800,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	755.620.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	512.680.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	33 Unit	304.250.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	81 Unit	48.430.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	160.000.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	1 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
2,	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	30 persen	457.045.700,00			
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	<i>Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</i>	1 Laporan	0,00			
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi</i>	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi</i>	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun</i>	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</i>	1 Laporan	457.045.700,00			
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	457.045.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</i>	1 Laporan	0,00			
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
3,	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	72,13 persen	364.873.950,00			
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki Akte Kelahiran</i> <i>Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang meninggal</i> <i>Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan bagi Penduduk yang menikah</i> <i>Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi penduduk yang bercerai</i>	97 persen 65,5 persen 63 persen 63 persen	364.873.950,00			
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	364.873.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.03.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	1 Laporan	0,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil</i>	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil</i>	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Jumlah Laporan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	1 Laporan	0,00			
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil</i>	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil</i>	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
4,	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	30 Persen	367.517.950,00			
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	1 Dokumen	13.491.950,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.04.1.01.0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	13.491.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	<i>Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi untuk layanan publik (kumulatif)</i>	12 Lembaga	352.026.000,00			
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	311.356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan</i>	1 Dokumen	40.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.04.1.02.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	<i>Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi</i>	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	<i>Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</i>	100 persen	2.000.000,00			
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	8	9	10	11	17
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</i>	26 Orang	0,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5,	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	100 Persen	220.381.000,00			
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	<i>Jumlah Buku Profil Kependudukan Setiap Tahun</i>	1 Laporan	220.381.000,00			
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	<i>Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia</i>	2 Dokumen	127.075.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	<i>Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun</i>	1 Dokumen	93.306.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
J U M L A H					10.895.039.247,18			

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Work Plan and Budget Allocation

Program dan Kegiatan - Tabel Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2026

4

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH			10.895.039.247,18				11.717.022.563,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.895.039.247,18				11.717.022.563,00
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			10.895.039.247,18				11.717.022.563,00
1,	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.485.220.647,18			-	10.017.022.563,00
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	9.485.220.647,18	-	-	-	10.017.022.563,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			579.006.700,00				565.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	119.131.700,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	12.950.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	209.029.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		249.000.000,00
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	37 Data	6.700.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Berita Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	1 Dokumen	8.250.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>	1 Berita Acara	222.946.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.000.000,00
			<i>Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu</i>	1 Substansi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	119.131.700,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	12.950.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	209.029.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		249.000.000,00
	2.12.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah							
			<i>Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	37 Data	6.700.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Berita Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
	2.12.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	1 Dokumen	8.250.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	2.12.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan							
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>	1 Berita Acara	222.946.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu							
			<i>Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu</i>	1 Subtansi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		90.000.000,00
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.934.732.892,18			-	6.190.840.817,00
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	42 Orang/ Bulan	5.895.039.442,18	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6.130.840.817,00
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	100 Dokumen	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	39.693.450,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000,00
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	42 Orang/ Bulan	5.895.039.442,18	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6.130.840.817,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	100 Dokumen	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	39.693.450,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000,00
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			66.659.800,00			-	80.000.000,00
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	5.099.900,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	25.049.900,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	36.510.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		29.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	5.099.900,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000,00
	2.12.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	25.049.900,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	36.510.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		29.000.000,00
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34.500.000,00			-	300.000.000,00
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	34.500.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1 Dokumen	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	5 Orang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	101 Orang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		74.000.000,00
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	5 Orang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000,00
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	34.500.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
	2.12.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1 Dokumen	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	5 Orang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	2.12.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	101 Orang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		74.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	5 Orang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000,00
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.296.880.015,00			-	720.000.000,00
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	8.175.340,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.000.000,00
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	313.431.300,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60.000.000,00
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	22.177.375,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	953.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	8.175.340,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.000.000,00
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	313.431.300,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60.000.000,00
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	22.177.375,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	953.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000.000,00
	2.12.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			92.174.440,00			-	168.329.946,00
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Paket	11.007.640,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	81.166.800,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		91.329.946,00
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.000.000,00
	2.12.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel							
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Paket	11.007.640,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	81.166.800,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		91.329.946,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		75.000.000,00
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			968.586.800,00			-	1.502.851.800,00
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	212.966.800,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		221.941.800,00
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	755.620.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1.280.910.000,00
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	212.966.800,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		221.941.800,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	755.620.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1.280.910.000,00
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			512.680.000,00			-	490.000.000,00
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	33 Unit	304.250.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		349.000.000,00
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	81 Unit	48.430.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000,00
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	160.000.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	33 Unit	304.250.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		349.000.000,00
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	81 Unit	48.430.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000,00
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	160.000.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00
	2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	-	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000,00
2,	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			457.045.700,00			-	550.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan]	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	30	457.045.700,00	-	-	-	550.000.000,00
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			-			-	50.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		24.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi							
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000,00
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24.000.000,00
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk							
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			457.045.700,00			-	300.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	457.045.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	457.045.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk							
			<i>Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			-			-	200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
3,	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			364.873.950,00			-	450.000.000,00
		<i>[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</i>	72,13	364.873.950,00	-	-	-	450.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			364.873.950,00			-	250.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	364.873.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	364.873.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	2.12.03.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil							
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00
2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			-			-	100.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Semua Kel/Desa			
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil							
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			-			-	100.000.000,00
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75.000.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil							
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75.000.000,00
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
4,	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			367.517.950,00			-	425.000.000,00
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	Persentase Data Kependudukan yang Dlmanfaatkan	100	367.517.950,00	-	-	-	425.000.000,00
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			13.491.950,00			-	50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	13.491.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00
	2.12.04.1.01.0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	13.491.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			352.026.000,00			-	225.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	311.356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan</i>	1 Dokumen	40.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		171.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	311.356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan</i>	1 Dokumen	40.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		171.000.000,00
	2.12.04.1.02.0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi</i>	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
			<i>Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			2.000.000,00			-	150.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</i>	26 Orang	-	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan							
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</i>	26 Orang	-	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
5,	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			220.381.000,00			-	275.000.000,00
		[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	100	220.381.000,00	-	-	-	275.000.000,00
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan			220.381.000,00			-	275.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia</i>	2 Dokumen	127.075.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		165.000.000,00
			<i>Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun</i>	1 Dokumen	93.306.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi							
			<i>Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia</i>	2 Dokumen	127.075.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		165.000.000,00
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain							
			<i>Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun</i>	1 Dokumen	93.306.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		110.000.000,00
J U M L A H					10.895.039.247,18				11.717.022.563,00

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan di daerah. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menjamin keterpaduan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah.

Dokumen ini menegaskan komitmen Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat pelayanan administrasi kependudukan sebagai hak dasar penduduk, basis data pembangunan, serta instrumen penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Melalui sinkronisasi dengan RPJMN 2025–2029, RKP 2026, serta arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diharapkan mampu memberikan panduan yang jelas dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kependudukan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi kualitas layanan, pemanfaatan teknologi, maupun pemerataan akses bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan RENJA ini memerlukan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi lintas sektor ini sangat penting untuk mewujudkan layanan Dukcapil yang inklusif, cepat, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan dan semangat pembangunan daerah yang berkeadilan, RENJA Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah sekaligus mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Semoga dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, target peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan dapat tercapai, sehingga masyarakat memperoleh manfaat nyata dari hadirnya pelayanan publik yang lebih baik.

Demikian RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, semoga bermanfaat.

Palu, 13 Oktober 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah



ANDA HAJIDIN, SE., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19710208 199903 1 003